

# PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Laksamana Yos Sudarso

Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018

e-mail : [watampone@pta-makassarkota.go.id](mailto:watampone@pta-makassarkota.go.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Laksamana Yos Sudarso**

**Telp. 21018 Fax. 21018**

**Bone - Sulawesi Selatan 92715**

**e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bone, 6 Juli 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi  
NIP.197412142006041002



# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	1
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca .....	16
III. Laporan Operasional .....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
A. Penjelasan Umum .....	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone .....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi .....	25
A.5. Dasar Pengukuran .....	25
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	32
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	36
C.1. Aset Lancar .....	36
C.2. Aset Tetap .....	37
C.3. Aset Lainnya .....	41
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	42
C.6. Ekuitas .....	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	43
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	43

D.2.	Beban Pegawai .....	43
D.3.	Beban Persediaan .....	44
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	45
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	45
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	45
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	46
D.8.	Kegiatan Non Operasional .....	47
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	47
E.1.	Ekuitas Awal .....	47
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	47
E.3.	3 Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	48
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	48
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	48
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	49
E.3.	Ekuitas Akhir.....	49
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	49
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	49
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	49
	Laporan-laporan Pendukung.....	52
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	53

# *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 .....	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2018.....	32
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2018 dan 2017 .....	32
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 .....	33
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018.....	33
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 .....	34
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 .....	34
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	35
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	36
Tabel 11 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 12 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama Watampone

Laksamana Yos Sudarso Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018 e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bone, 6 Agustus 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi

NIP.197412142006041002

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6,587,444 atau mencapai 76,07 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp8.660.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp5.510.622.063 atau mencapai 59,31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.290.795.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	8.660.000	6,587,444	76,07	7.879.980
Belanja Negara	9.290.795.000	5.510.622.063	59,31	3.727.045.567

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp11,939,909,108, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp41.254.800; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp11,898,654,308; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp41.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp41.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp11,939,909,108, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp41.000.000 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp11,898,909,108.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2** Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2018	2017	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	41.254.800	103.400	41,151,400	39,798.25
Aset Tetap	11,898,654,308	5,781,107,986	6,117,546,322	105.81
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>11,939,909,108</b>	<b>5,781,211,386</b>	<b>6,158,697,722</b>	<b>106.52</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	41.000.000	28,445,630	12,554,370	44.13
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>41.000.000</b>	<b>28,445,630</b>	<b>12,554,370</b>	<b>44.13</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	11,898,909,108	5,752,765,756	6,146,143,352	106.83
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>11,898,909,108</b>	<b>5,752,765,756</b>	<b>6,146,143,352</b>	<b>106.83</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>11,939,909,108</b>	<b>5,781,211,386</b>	<b>6,158,697,722</b>	<b>106.52</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp6,587,318, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5,483,184,591 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5,476,597,273) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp(358,774) dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(5,476,956,047)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp5,752,765,756 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(5,476,956,047) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp6,119,064,780 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5,504,034,619 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp11,898,909,108

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0,00	7.879.980
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>8.660.000</b>	<b>6,587,444</b>	<b>76,07</b>	<b>7.879.980</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	8.362.373.000	4.902.391.069	58,62	3.242.308.067
2.	Belanja Barang	B.2.2.	759.922.000	440.260.994	57,93	379.837.500
3.	Belanja Modal	B.2.3.	168.500.000	167.970.000	99,68	104.900.000
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>9.290.795.000</b>	<b>5.510.622.063</b>	<b>59,31</b>	<b>3.727.045.567</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	41.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	254,800	103,400
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>41,254,800</b>	<b>103,400</b>
<b>Aset Tetap</b>			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	5,238,828,000	1,582,240,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1,969,866,028	1,823,896,028
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6,175,578,000	4,642,914,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	19,988,100	19,988,100
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	14,997,470	14,997,470
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1,520,603,290)	( 2,302,927,612)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>11,898,654,308</b>	<b>5,781,107,986</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
C.4			
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	22.000.000	288,738,237
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(22.000.000)	(288,738,237)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>11,939,909,108</b>	<b>5,781,211,386</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
C.5			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	28,445,630
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	41.000.000	0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		41.000.000	28,445,630
Jumlah Kewajiban		41.000.000	28,445,630
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		11,898,909,108	5,752,765,756
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		11,939,909,108	5,781,211,386

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6,587,318	6,829,632
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>6,587,318</b>	<b>6,829,632</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	4,882,401,066	3,244,752,575
Beban Persediaan	D. 3	19,815,600	12,419,975
Beban Barang dan Jasa	D. 4	184,880,877	170,547,606
Beban Pemeliharaan	D. 5	198,155,590	153,188,300
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	28.443.000	36.974.400
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	169,488,458	112,952,967
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>5,483,184,591</b>	<b>3,730,835,823</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>( 5,476,597,273)</b>	<b>( 3,724,006,191)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	1,050,000
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
<b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>( 358,774)</b>	<b>117,648</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>( 358,774)</b>	<b>1,167,648</b>

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	( 5,476,956,047)	( 3,722,838,543)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	5,752,765,756	5,790,612,332
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	( 5,476,956,047)	( 3,722,838,543)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	5,465,652,780	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	653,412,000	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	5,504,034,619	3,719,165,587
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>11,898,909,108</b>	<b>5,786,939,376</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

- Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah : MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG

Misi Pengadilan Agama Watampone adalah

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Watampone melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

### a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat mendukung dalam sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal
3. Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
4. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai

### b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas
  2. Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerimaan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

3. Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang		
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan	20

<b>Varietas Tanaman Semusim.</b>	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

#### **(7.) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp6.587.444*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp6.587.444 atau mencapai 76,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8.660.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Watampone adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.660.000	2.846.758	32,87
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3.740,686	0,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>8,660,000</b>	<b>6,587,444</b>	<b>76,06</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.(1.292.536) atau (3.54) persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena:

1. Pada tahun 2018 terdapat pendapatan dari penghapusan BMN, sedangkan pada tahun 2017 tidak ada penghapusan
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Watampone

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.050.000	(1.050.000)	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,846,758	2.157.250	689.508	28,33
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	126	348	(222)	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3,740,560	4.672.382	(931.822)	(13,76)
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>6.587.444</b>	<b>7.879.980</b>	<b>(1.292.536)</b>	<b>0,00</b>

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
5.510.622.06  
3

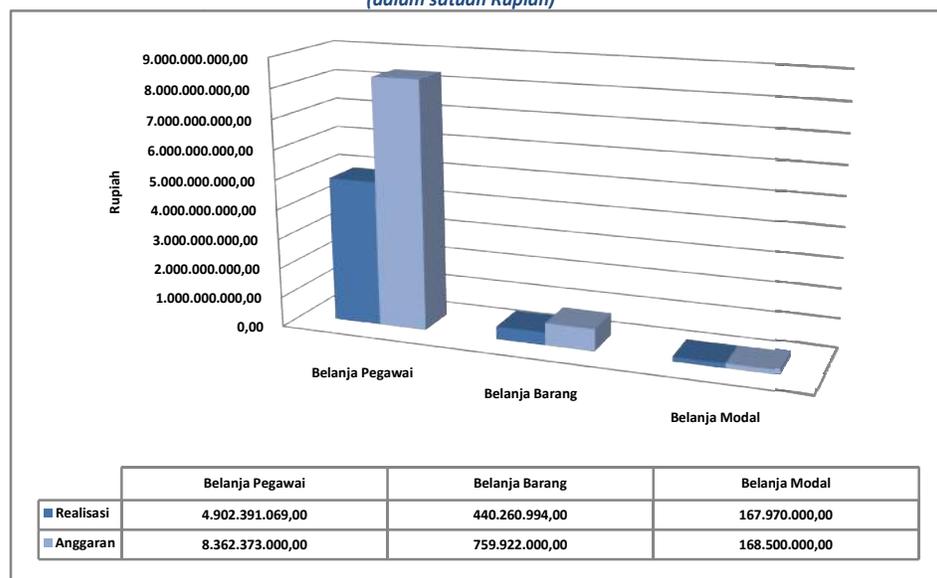
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 5.510.622.063 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 59,31% dari anggaran senilai Rp. 9.290.795.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.362.373.000	4.902.391.069	58,62
Belanja Barang	759.922.000	440.260.994	57,93
Belanja Modal	168.500.000	167.970.000	99,68
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>9.290.795.000</b>	<b>5.510.622.063</b>	<b>59,31</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>9.290.795.000</b>	<b>5.510.622.063</b>	<b>59,31</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.783.576.496 atau sebesar 47,85 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut

disebabkan karena:

1. Adanya mutasi hakim yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebanyak 7 orang
2. Adanya kenaikan pangkat PNS
3. Adanya peningkatan Belanja Barang PNS
4. Adanya realisasi belanja modal pada semester I Tahun 2018

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	4.902.391.069	3.242.308.067	1.660.083.002	51,20
Belanja Barang	440.260.994	379.837.500	60.423.494	15,90
Belanja Modal	167.970.000	104.900.000	63.070.000	60,12
<b>Total Belanja</b>	<b>5.510.622.063</b>	<b>3.727.045.567</b>	<b>1.783.576.496</b>	<b>47,85</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp  
4.902.391.06  
9*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 4.902.391.069 dan Rp. 3.242.308.067.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 51,20 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya mutasi hakim yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebanyak 7 orang;
2. Adanya kenaikan pangkat PNS

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.315.730.700	1.057.820.700	257.910.000	24,38
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.544	10.413	4.131	39,67
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	96.587.990	57.997.590	38.590.400	66,53
Beban Tunj. Anak PNS	29.139.348	18.843.052	10.296.296	54,64

Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	16.440.000	3.720.000	22,62
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.655.835.000	1.588.550.000	1.067.285.000	67,18
Beban Tunj. PPh PNS	388.322.807	213.535.619	174.787.188	81,85
Beban Tunj. Beras PNS	54.604.680	43.596.840	11.007.840	25,24
Beban Uang Makan PNS	177.776.000	121.554.000	56.222.000	46,25
Beban Tunjangan Umum PNS	2.220.000	1.110.000	1.110.000	100,00
Beban Tunjangan Kemahalan	162.000.000	122.850.000	39.150.000	31,86
<b>Hakim</b>				
Total Belanja Brutto	4.902.391.069	3.242.308.214	1.660.082.855	51,20
Pengembalian Belanja	0	(147)	147	(100,00)
Total Belanja Netto	4.902.391.069	3.242.308.067	1.660.083.002	51,20

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja Barang  
:  
Rp440.260.994

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 440.260.994 dan Rp. 379.837.500.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,90 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena Peningkatan Realisasi Belanja Barang pada Semester I tahun 2018.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	155.047.842	138.371.000	16.676.842	12,05
Belanja Barang Non Operasional	1.016.100	2.582.500	(1.566.400)	(60,65)
Belanja Jasa	37.272.562	35.908.400	1.364.162	3,79
Belanja Pemeliharaan	194.145.490	152.256.300	41.889.190	27,51
Belanja Perjalanan Dinas	28.443.000	36.974.400	(8.531.400)	(23,07)
Total Belanja Brutto	440.260.994	379.837.500	60.423.494	15,90
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	440.260.994	379.837.500	60.423.494	15,90

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi  
Belanja Modal  
:  
Rp167.970.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 167.970.000 dan Rp. 104.900.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 60,12 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan karena Pada

Semester I Tahun 2018 Belanja Modal telah selesai dilaksanakan

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	167.970.000	104.900.000	63.070.000	46,62
Total Belanja Brutto	167.970.000	104.900.000	63.070.000	60,12
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	167.970.000	104.900.000	63.070.000	60,12

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
41,254,800

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 41,254,800 dan Rp. 103.400.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Watampone per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	41.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	103.400
Persediaan	254.800	0
Total Aset Lancar	41.254.800	103.400

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp41.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah

sebesar Rp41.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	31 Desember TA 2017
1.	Uang Tunai di Brandkas	23.573.763	0
2.	Uang di Rek. Bank	0	0
3.	Kuitansi UP	17.426.237	0
	<b>Jumlah</b>	<b>41.000.000</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp254.800*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp254.800 dan Rp103.400. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017**

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	254.800	103.400
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>254.800</b>	<b>103.400</b>

### C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
11.898.654.308*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp11.898.654.308 dan Rp5.781.107.986. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	5,238,828,000	1,582,240,000	3,656,588,000
2	Peralatan dan Mesin	1,969,866,028	1,823,896,028	145,970,000
3	Gedung dan Bangunan	6,175,578,000	4,642,914,000	1,532,664,000
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	19,988,100	19.988.100	0
5	Aset Tetap Lainnya	14,997,470	14,997,470	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>13.419.257.598</b>	<b>2.302.927.612</b>	<b>5.335.222.000</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(1,520,603,290)</b>	<b>( 2,302,927,612)</b>	<b>782,324,322</b>
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>11,898,654,308</b>	<b>5,781,107,986</b>	<b>6,117,546,322</b>

### C.2.1. Tanah

*Tanah:  
Rp5,238,828,000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp5,238,828,000 dan Rp1,582,240,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

**Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.308	14/1982	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Negara Gol. II	1.406.704.000
2.	2	3.424	13/2014	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Bangunan Kantor Pemerintah	3.832.124.000
	<b>Jumlah</b>					<b>5.238.828.000</b>

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya Revaluasi pada bulan Februari 2018 oleh KPKNL Pare-Pare

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-

1,969,866,028 masing adalah sebesar Rp1,969,866,028 dan Rp1,823,896,028

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	1,823,896,028
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Pembelian</b>	<b>167.970.000</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>Penghentian BMN dari Penggunaan</b>	<b>22.000.000</b>
Saldo per 31 Desember 2017	1,969,866,028
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	1.443.524.479
Nilai Buku 31 Desember 2017	526.341.549

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp168.500.000 dan Rp230.000.000. yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	High Filling Cabinet Slide Glass White	5	Buah	3,795,000	18.975.000
2.	Low Filling Cabinet Slide Glass White	7	Buah	2,024,000	14.168.000
3.	Rak Besi	1	Buah	3,795,000	3,795,000
4.	Brandkas	1	Buah	8,250,000	8,250,000
5.	Sice	1	Set	15,730,000	15,730,000
6.	Tangga Aluminium	1	Buah	2,992,000	2,992,000
7.	Lemari Toga	1	Buah	2,970,000	2,970,000
8.	Kursi Pimpinan	1	Buah	10,615,000	10,615,000
9.	Lap Top	7	Unit	12,925,000	90.475.000
<b>J U M L A H</b>					<b>167.970.000</b>

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan  
Bangunan :  
Rp6,175,578,000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp6,175,578,000 dan Rp4,642,914,000

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	4.642.914.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
<b>Koreksi Tim Aset</b>	<b>1.532.664.000</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	

	0
Saldo per 30 Juni 2018	6.175.578.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	75.829.556
Nilai Buku 31 Desember 2017	6.099.748.444

Mutasi Gedung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adanya Revaluasi dari KPKNL Pare-Pare pada bulan Februari 2018, dari hasil Revaluasi tersebut, ditemukan barang berlebih berupa :

1. Pagar Kantor
2. Pos Jaga sebanyak 2 unit

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan :  
Rp19.988.100*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp19.988.100 dan Rp19.988.100.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2018	19.988.100
<b>Mutasi Tambah</b>	
	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
	0
Saldo per 31 Desember 2017	19.988.100
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	1.249.255
Nilai Buku 31 Desember 2017	18.738.845

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya:  
Rp14.997.470*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar

Rp14.997.470 dan Rp14.997.470.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.997.470.

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada tahun 2018

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
(1,520,603,290)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp(1,520,603,290) dan Rp(2,302,927,612).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.969.866.028	1.443.524.479	526.341.549
2	Gedung dan Bangunan	6.175.578.000	75.829.556	6.099.748.444
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	19.988.100	1.249.255	18.738.845
4	Aset Tetap Lainnya	14.997.470	0	14.997.470
	<b>Jumlah</b>	<b>8.180.429.598</b>	<b>1.520.603.290</b>	<b>6.659.826.308</b>

*Aset Lainnya:  
Rp22.000.000*

### C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp22.000.000 dan Rp288.738.237. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	22.000.000	288.738.237
	Nilai perolehan Aset Lainnya	22.000.000	288.738.237
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(22.000.000)	(273.963.237)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

#### C.4.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :  
Rp 22.000.000

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp22.000.000 dan Rp288.738.237. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Watampone serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2017	288.738.237
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	266.738.237
Saldo per 30 Juni 2018	22.000.000

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Watampone berupa Laptop Toshiba 2 unit.

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

#### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp41.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp41.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Ekuitas:*  
*Rp*  
*11.898.909.108*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.898.909.108 dan Rp5.752.765.756. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan*  
*PNbp :*  
*Rp6,587,318*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp6.587.318 dan Rp6.829.632. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.660.000	2.846.756	32,87
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	126	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3.740.560	0,00
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>8.660.000</b>	<b>6.587.318</b>	<b>76,05</b>

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
*: Rp*  
*4.882.401.066*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.882.401.066 dan Rp3.244.752.575. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.311.955.900	1.060.012.699	251.943.201	23,76
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.954	10.301	3.653	35,46
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	96.315.980	58.216.790	38.099.190	65,44
Beban Tunj. Anak PNS	29.052.120	18.876.326	10.175.794	53,90
Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	16.440.000	3.720.000	22,62
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.642.635.000	1.588.550.000	1.054.085.000	66,35
Beban Tunj. PPh PNS	385.667.432	213.535.619	172.131.813	80,61
Beban Tunj. Beras PNS	54.604.680	43.596.840	11.007.840	25,24
Beban Uang Makan PNS	177.776.000	121.554.000	56.222.000	46,25
Beban Tunjangan Umum PNS	2.220.000	1.110.000	1.110.000	100,00
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	162.000.000	122.850.000	39.150.000	31,86
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>4.882.401.066</b>	<b>3.242.308.214</b>	<b>1.640.092.852</b>	<b>51,54</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :  
Rp19.815.600*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp19.815.600 dan Rp12.419.975. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	19.815.600	12.419.975	7.395.625	59,54
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>19.815.600</b>	<b>12.419.975</b>	<b>7.395.625</b>	<b>59,54</b>

## D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp  
184.880.877*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp184.880.877 dan Rp170.547.606. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	112.573.542	89.516.200	23.057.342	25,75
Beban Jasa Pos dan Giro	685.500	649.100	36.400	5,60
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24.150.000	24.150.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	16.725.000	24.055.700	(7.330.700)	(30,47)
Beban Bahan	1.016.100	2.582.500	(1.566.400)	(60,65)
Beban Langganan Listrik	25.281.488	22.718.197	2.563.291	11,28
Beban Langganan Telepon	622.747	2.788.009	(2.165.262)	(77,66)
Beban Langganan Air	3.826.500	4.087.900	(261.400)	(6,39)
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>184.880.877</b>	<b>121.906.000</b>	<b>62.974.877</b>	<b>32,53</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp198.155.590*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp198.155.590 dan Rp153.188.300. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148.147.300	121.906.000	26.241.300	21,52
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.998.190	30.350.300	15.647.890	51,55
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	4.010.100	932.000	3.078.100	30,27
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>198.155.590</b>	<b>153.188.300</b>	<b>44.967.290</b>	<b>29,35</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp28.443.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah

masing-masing sebesar Rp28.443.000 dan Rp36.974.400. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	28.443.000	36.974.400	(8.531.400)	(23,07)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>28.443.000</b>	<b>36.974.400</b>	<b>(8.531.400)</b>	<b>(23,07)</b>

## D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp169.488.458*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp169.488.458 dan Rp112.952.967. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	93.409.051	66.273.976	27.135.075	40,94
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75.829.556	46.429.140	29.400.416	63,32
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	249.851	249.851	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>169.488.458</b>	<b>112.952.967</b>	<b>56.535.491</b>	<b>50,05</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0

Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>169.488.458</b>	<b>112.952.967</b>	<b>56.535.491</b>	<b>50,05</b>

## D.8. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp358.900

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	1.050.000	(1.050.000)	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu	126	348	222	(6,21)
Pendapatan Penyesuaian Nilai	0	117.300	117.300	100
Persediaan				
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	358.900	0	358.900	0
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>(358.774)</b>	<b>1.167.648</b>	<b>(1.526.422)</b>	<b>30,73</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.752.765.756 dan Rp5.790.612.332

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp(5.476.956.047) dan Rp(3.722.838.543) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.465.652.780 dan Rp.0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari Tanah dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Watampone.

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp653.412.000 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai akan tetapi berasal dari Barang berlebih.

### E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.504.034.619 dan Rp3.719.165.587

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(6.587.444)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.510.622.063
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>5.504.034.619</b>

### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp(6.587.444) sedangkan DKEL sebesar Rp(7.879.980)

### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.898.909.108 dan Rp5.786.939.376

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Terjadi selisih Hibah pada Eselon I, disebabkan karena Hibah berupa Mushalla di Pengadilan Agama Watampone, oleh KPKNL Pare-Pare, dimasukkan sebagai temuan Barang berlebih dan dimasukkan kedalam aplikasi simak sebagai barang berlebih. sementara oleh Pengadilan Agama Watampone sedang dalam pengajuan Proses Hibah di Kanwil Anggaran

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak terdapat temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK periode laporan ini.

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja Gaji Pokok Hakim yang seharusnya dibayarkan bulan Oktober s.d Desember sebesar Rp.3.774.800 namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2018.
2. Terdapat belanja Tunjangan Isteri/Suami Hakim yang seharusnya dibayarkan bulan Oktober s.d Desember sebesar Rp.272.010 namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2018;

3. Terdapat belanja Tunjangan Anak Hakim yang seharusnya dibayarkan bulan Oktober s.d Desember sebesar Rp.87.228 namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2018
4. Terdapat belanja Tunjangan Jabatan Fungsional Hakim yang seharusnya dibayarkan bulan Oktober s.d Desember sebesar Rp.13.200.000 namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2018

### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Watampone adalah:

1. BRI Cab. Watampone A/C 0111-01-000120-30-6 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.
2. BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.
3. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.369.922.571.

### **F.2.4. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Ralat Rencana Penarikan Dana (Hal. III DIPA) pada Triwulan I
2. Revisi POK yang tidak mengalami pergeseran Akun.

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode Laporan Semester I Tahun 2018.

### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI., Nomor 42/PA/SK/XII/2017 Tanggal : 4 Desember Tahun 2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadila Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu :

***H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si***

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/001/KU.00/SK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen	: Nurhidayah, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Maftukhah Mustafa, S.Kom
Bendahara	: Heriawati, SH

# *LAPORAN PENDUKUNG*

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

